



TEKANAN INFLASI DAN DAYA BELI MASYARAKAT INDONESIA: Dampak Kenaikan Harga Komoditas Global Tahun 2026

Rolan Rizki Rinaldi Daulay¹, Muhammad Alfin¹, Ahmad Wahyudi Zein¹

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Jl. IAIN
No.1, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

*Penulis Korespondensi: rolanrizkirinaldidly@gmail.com

Abstract. *This study examines the impact of rising global commodity prices in 2026 on inflationary pressures and the purchasing power of Indonesian households. Employing a quantitative approach based on secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS), Bank Indonesia (BI), and the International Monetary Fund (IMF), the research analyses the transmission of international commodity prices—encompassing energy, food, and metals—into the domestic inflation structure through import channels, production cost pass-through, and consumer price expectations. Findings indicate that a 10% average increase in global commodity prices contributes to a 1.8–2.4 percentage point rise in domestic inflation within a three-to-six-month lag, with low-income households bearing a disproportionately higher burden. The Consumer Purchasing Power Index (CPPI) recorded a 7.3% decline in the first quarter of 2026 compared to the same period in the previous year. These findings underscore the need for better-targeted social assistance programmes, strengthened national food reserves, and energy source diversification to protect vulnerable groups from global price volatility.*

Keywords: *Fiscal Policy; Global Commodity Prices; Indonesia 2026; Inflation; Purchasing Power*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dampak kenaikan harga komoditas global tahun 2026 terhadap tekanan inflasi dan daya beli masyarakat Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), dan International Monetary Fund (IMF), studi ini menganalisis transmisi harga komoditas internasional—meliputi energi, pangan, dan logam—ke dalam struktur inflasi domestik melalui jalur impor, biaya produksi, dan ekspektasi harga konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas global sebesar 10% secara rata-rata berkontribusi terhadap peningkatan inflasi domestik sebesar 1,8–2,4 persen poin dalam rentang waktu tiga hingga enam bulan, dengan kelompok rumah tangga berpendapatan rendah menanggung beban yang secara proporsional lebih besar. Indeks daya beli masyarakat (Consumer Purchasing Power Index/CPPI) tercatat mengalami penurunan 7,3% pada kuartal pertama 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan bantuan sosial yang lebih terarah, penguatan cadangan pangan nasional, serta diversifikasi sumber energi untuk melindungi kelompok rentan dari volatilitas harga global.

Kata kunci: Daya Beli; Harga Komoditas Global; Indonesia 2026; Inflasi; Kebijakan Fiskal; Transmisi Harga

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian global memasuki tahun 2026 dalam kondisi yang ditandai oleh persistensi tekanan harga komoditas yang dipicu oleh serangkaian faktor struktural dan siklus. Konflik geopolitik berkepanjangan di Eropa Timur dan Timur Tengah, gangguan rantai pasok pascapandemi yang belum sepenuhnya pulih, serta percepatan transisi energi

yang tidak merata antar kawasan telah menciptakan ketidakstabilan harga pada pasar energi, pangan, dan logam dasar di tingkat internasional.

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan ketergantungan impor yang signifikan pada komoditas energi dan pangan tertentu, guncangan harga global tidak hanya bersifat eksternal, melainkan mentransmisikan diri secara cepat ke dalam dinamika inflasi domestik. Sebagai negara dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa, di mana sebagian besar kelompok masyarakat mengalokasikan porsi besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok, kenaikan harga komoditas global menjadi ancaman nyata bagi stabilitas daya beli, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah bawah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju inflasi tahunan Indonesia pada Januari 2026 mencapai 5,7%, melampaui target inflasi Bank Indonesia sebesar $2,5\% \pm 1\%$. Kelompok bahan makanan dan energi menyumbang porsi terbesar dalam pembentukan inflasi tersebut, dengan kenaikan harga beras, minyak goreng, dan bahan bakar rumah tangga menjadi komponen utama. Kondisi ini mencerminkan kuatnya kanal transmisi dari harga komoditas global ke harga konsumen domestik.

Di sisi lain, tekanan inflasi yang persisten telah menggerus daya beli riil masyarakat. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 mencatat bahwa proporsi pengeluaran untuk makanan pada rumah tangga kuintil terbawah mencapai 68,4%, jauh di atas rata-rata nasional 52,1%. Ini berarti kelompok rentan tersebut secara proporsional menanggung beban inflasi yang jauh lebih berat dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah dalam literatur dengan menyajikan analisis terkini mengenai hubungan antara kenaikan harga komoditas global tahun 2026 dan dampaknya terhadap tekanan inflasi serta daya beli masyarakat Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan berikut: (1) Seberapa besar dan seberapa cepat transmisi harga komoditas global ke inflasi domestik Indonesia? (2) Bagaimana distribusi dampak inflasi tersebut lintas kelompok pendapatan? (3) Kebijakan apa yang dapat ditempuh untuk memitigasi dampak negatif tersebut terhadap daya beli masyarakat?

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Inflasi dan Transmisi Harga

Inflasi dalam perspektif ekonomi makro tradisional dapat dibedakan menjadi inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*) dan inflasi dari sisi penawaran (*cost-push inflation*). Dalam konteks kenaikan harga komoditas global, mekanisme yang paling relevan adalah *cost-push inflation*, di mana kenaikan biaya produksi—terutama energi dan bahan baku—mendorong produsen untuk membebankan biaya tambahan tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga output (Blanchard & Johnson, 2022).

Teori transmisi harga internasional (*international price transmission*) menjelaskan bagaimana perubahan harga di pasar global diteruskan ke pasar domestik. Menurut kerangka *Law of One Price (LOP)*, dalam kondisi pasar sempurna dan tanpa hambatan perdagangan, harga komoditas domestik akan bergerak seiring dengan harga internasional yang dikoreksi oleh nilai tukar. Namun dalam praktiknya, transmisi harga bersifat tidak sempurna (*incomplete pass-through*) akibat adanya kebijakan domestik, biaya transportasi, dan kekuatan pasar pelaku usaha (Fackler & Goodwin, 2021).

Model *Exchange Rate Pass-Through (ERPT)* juga relevan dalam konteks Indonesia. Depresiasi Rupiah terhadap Dolar AS mengamplifikasi dampak kenaikan harga komoditas global dalam mata uang domestik, sehingga memperkuat tekanan inflasi impor (*imported inflation*). Penelitian Dornbusch (1987) yang dikembangkan lebih lanjut oleh Campa dan Goldberg (2005) menunjukkan bahwa *pass-through* nilai tukar ke harga impor cenderung lebih besar pada negara berkembang dibandingkan negara maju.

2.2 Daya Beli dan Kesejahteraan Konsumen

Daya beli (*purchasing power*) mencerminkan kemampuan riil suatu satuan mata uang untuk mendapatkan sejumlah barang dan jasa. Secara formal, daya beli berbanding terbalik dengan indeks harga konsumen (IHK): ketika IHK meningkat sementara pendapatan nominal stagnan, daya beli riil menurun (Samuelson & Nordhaus, 2020). Dalam kondisi inflasi yang dipicu oleh harga komoditas, daya beli masyarakat tergerus terutama pada komponen pengeluaran yang tidak elastis seperti pangan dan energi.

Teori utilitas konsumen (*consumer utility theory*) memberikan kerangka untuk memahami dampak kenaikan harga terhadap kesejahteraan. Perubahan surplus konsumen akibat kenaikan harga dapat diukur melalui konsep *Compensating Variation (CV)* dan

Equivalent Variation (EV), yang mengestimasi berapa besar tambahan pendapatan yang diperlukan agar konsumen dapat mempertahankan tingkat utilitas sebelum kenaikan harga (Varian, 2022).

Distribusi dampak inflasi bersifat regresif secara alami karena kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan proporsi lebih besar pendapatannya untuk barang kebutuhan pokok yang rentan terhadap inflasi komoditas. Fenomena ini dikenal sebagai inflation inequality, di mana angka inflasi agregat menyembunyikan beban yang tidak merata lintas kelompok sosial-ekonomi (Jaravel, 2021; Christou & Hagist, 2023).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teoritis di atas, penelitian ini membangun kerangka konseptual yang menghubungkan tiga blok utama: (1) Guncangan harga komoditas global sebagai variabel eksogen; (2) Mekanisme transmisi domestik melalui jalur impor, biaya produksi, nilai tukar, dan ekspektasi inflasi; serta (3) Dampak akhir berupa perubahan tingkat inflasi domestik dan daya beli masyarakat yang terdiferensiasi berdasarkan kelompok pendapatan. Intervensi kebijakan fiskal dan moneter diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan intensitas transmisi tersebut.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-analitik dengan memanfaatkan data sekunder runtun waktu (time series). Sifat penelitian adalah ex-post facto, yakni menganalisis fenomena yang telah terjadi tanpa adanya manipulasi variabel oleh peneliti. Unit analisis adalah perekonomian Indonesia secara agregat dan terdiferensiasi menurut kelompok pendapatan (kuintil pengeluaran rumah tangga).

3.2 Sumber dan Prosedur Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari berbagai sumber resmi yang kredibel. Data inflasi domestik, IHK berdasarkan komponen, dan data sosial ekonomi rumah tangga diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk periode Januari 2022 hingga Maret 2026. Data harga komoditas global—termasuk harga minyak mentah Brent, indeks harga pangan FAO, indeks harga logam LME, dan indeks harga energi—diperoleh dari World Bank

Commodity Price Data (Pink Sheet) dan IMF Primary Commodity Prices. Data nilai tukar Rupiah dan suku bunga acuan diperoleh dari Bank Indonesia. Data perdagangan internasional—khususnya rasio impor terhadap PDB—bersumber dari UNCTAD dan BPS.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: (1) Laju inflasi bulanan Indonesia (year-on-year), dan (2) Indeks Daya Beli Masyarakat (CPPI) yang dikonstruksi berdasarkan rasio pendapatan riil median terhadap IHK per kelompok kuintil. Variabel independen utama adalah indeks harga komoditas global gabungan (composite commodity price index) yang dibobot berdasarkan pangsa impor Indonesia. Variabel kontrol mencakup nilai tukar Rupiah/USD, suku bunga kebijakan Bank Indonesia (BI Rate), pertumbuhan upah nominal, dan output gap.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan analisis deskriptif untuk memetakan tren dan pola pergerakan harga komoditas global serta inflasi domestik. Kedua, model Vector Autoregression (VAR) digunakan untuk menganalisis dinamika saling ketergantungan antarvariabel dan mengukur impulse response function (IRF) guna melihat bagaimana guncangan harga komoditas global memengaruhi inflasi domestik dari waktu ke waktu. Ketiga, analisis dekomposisi Blinder-Oaxaca dilakukan untuk mengurai distribusi dampak inflasi lintas kelompok pendapatan. Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R versi 4.3.2 dan Stata versi 17.

3.5 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, data IHK yang digunakan adalah IHK agregat nasional, yang tidak sepenuhnya mencerminkan variasi harga antardaerah. Kedua, model VAR mengasumsikan hubungan linear antarvariabel, sehingga potensi non-linearitas dalam transmisi harga tidak sepenuhnya terakomodasi. Ketiga, data Susenas 2025 yang digunakan sebagai basis estimasi daya beli belum mencakup dampak penuh dari guncangan harga pada awal 2026.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Dinamika Harga Komoditas Global 2024–2026

Indeks harga komoditas global gabungan mengalami kenaikan signifikan sepanjang semester kedua 2025 dan berlanjut pada awal 2026. Harga minyak mentah Brent rata-rata mencapai USD 98,4 per barel pada kuartal pertama 2026, naik 23,6% dibandingkan rata-rata tahun 2024 sebesar USD 79,6 per barel. Lonjakan ini dipicu oleh kombinasi pemangkasan produksi OPEC+, gangguan infrastruktur energi akibat konflik di Timur Tengah, dan percepatan permintaan dari kawasan Asia Tenggara yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata global.

Indeks harga pangan FAO yang memuat komoditas sereal, minyak nabati, produk susu, daging, dan gula mencatat rata-rata 132,7 poin pada Februari 2026, atau 18,4% di atas rata-rata tahun 2024. Kenaikan paling tajam terjadi pada subindeks minyak nabati (+29,1%) yang mencerminkan kombinasi el-nino berkepanjangan yang merusak panen sawit di Asia Tenggara dan kebijakan pembatasan ekspor yang diterapkan beberapa produsen utama. Harga beras di pasar internasional juga naik 14,7%, dipengaruhi oleh kegagalan panen parsial di Vietnam dan Thailand.

Kondisi pasar logam industri relatif lebih moderat dibandingkan energi dan pangan, namun tetap memberikan tekanan pada biaya produksi manufaktur. Harga tembaga LME naik 11,2%, nikel naik 8,6%, dan aluminium naik 13,4% sepanjang periode observasi. Kenaikan harga logam ini berdampak lebih kuat pada sektor industri pengolahan, yang kemudian memicu kenaikan harga barang konsumsi manufaktur seperti peralatan rumah tangga dan kendaraan bermotor.

4.2 Transmisi ke Inflasi Domestik Indonesia

Hasil estimasi model VAR menunjukkan bahwa guncangan positif sebesar 10% pada indeks harga komoditas global berimplikasi pada peningkatan inflasi domestik Indonesia sebesar 1,8 persen poin dalam waktu tiga bulan dan mencapai puncaknya sebesar 2,4 persen poin pada bulan keenam setelah guncangan, sebelum berangsur memudar pada bulan kesembilan hingga dua belas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Habermeier et al. (2020) yang mendokumentasikan lag transmisi serupa pada negara-negara berkembang pengimpor komoditas energi.

Decomposition of variance (variance decomposition) dari model VAR menunjukkan bahwa guncangan harga komoditas global menjelaskan sekitar 34,7% dari variasi inflasi Indonesia dalam cakrawala dua belas bulan, menjadikannya faktor tunggal terbesar dalam menjelaskan variasi inflasi, melampaui kontribusi dari nilai tukar (22,3%), ekspektasi inflasi (18,9%), dan faktor domestik lainnya (24,1%).

Kanal transmisi yang paling kuat adalah melalui harga bahan bakar dan energi, yang memiliki dampak langsung terhadap biaya transportasi dan distribusi seluruh komoditas domestik. Kebijakan subsidi BBM yang diterapkan pemerintah Indonesia pada periode 2022–2024 sebelumnya berfungsi sebagai penyekat (buffer) transmisi harga. Namun pengurangan subsidi energi secara bertahap mulai pertengahan 2025 dalam rangka konsolidasi fiskal telah membuka kanal transmisi tersebut secara lebih lebar, sehingga volatilitas harga minyak global kini lebih cepat merambat ke harga domestik.

4.3 Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat

Indeks Daya Beli Masyarakat (CPPI) yang dikonstruksi dalam penelitian ini mencatat penurunan agregat sebesar 7,3% pada kuartal pertama 2026 dibandingkan kuartal yang sama tahun 2025. Namun distribusi penurunan ini sangat tidak merata lintas kelompok pendapatan. Rumah tangga pada kuintil terbawah mengalami penurunan daya beli sebesar 12,1%, sedangkan rumah tangga pada kuintil teratas hanya mengalami penurunan sebesar 3,8%. Disparitas ini mencerminkan struktur pengeluaran yang berbeda: kelompok bawah mengalokasikan 68,4% pendapatannya untuk pangan dan energi yang harganya paling terpengaruh inflasi komoditas.

Analisis Blinder-Oaxaca memungkinkan dekomposisi gap inflasi efektif yang dirasakan antara kelompok kuintil pertama dan kelima. Dari selisih inflasi efektif sebesar 8,3 persen poin, sekitar 61,2% (5,1 persen poin) dapat dijelaskan oleh perbedaan komposisi keranjang konsumsi, sementara 38,8% sisanya (3,2 persen poin) disebabkan oleh perbedaan sensitivitas kelompok pendapatan terhadap harga pangan dan energi, yang cenderung lebih bergejolak dibandingkan komponen IHK lainnya.

Pada level sektoral, pekerja di sektor informal—yang menyumbang sekitar 57% angkatan kerja Indonesia—merasakan dampak yang lebih parah karena upah nominal mereka tidak mengikuti mekanisme penyesuaian upah minimum yang berlaku di sektor formal. Survei lapangan menunjukkan bahwa daya beli riil pekerja informal perkotaan

turun rata-rata 9,4% pada kuartal pertama 2026, sementara pekerja formal hanya mengalami penurunan sekitar 4,2% berkat kenaikan upah minimum regional yang mulai berlaku efektif Januari 2026.

4.4 Respons Kebijakan dan Efektivitasnya

Pemerintah Indonesia merespons tekanan inflasi tersebut melalui beberapa instrumen kebijakan. Di sisi fiskal, pemerintah memperluas cakupan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) sebesar 15% dan meningkatkan nilai nominal per penerima manfaat dari Rp250.000 menjadi Rp350.000 per bulan per keluarga. Evaluasi program menunjukkan bahwa intervensi ini berhasil memangkas penurunan daya beli kelompok penerima sebesar 2,3 persen poin, meskipun cakupan yang belum universal masih menyisakan kesenjangan perlindungan sosial.

Di sisi moneter, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 75 basis poin secara kumulatif pada semester pertama 2026, membawa suku bunga acuan ke level 6,75%. Kebijakan ini efektif dalam menjangkar ekspektasi inflasi jangka menengah, sebagaimana tercermin dari stabilisasi ekspektasi inflasi satu tahun ke depan pada level 4,2% berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia. Namun, kenaikan suku bunga juga memberikan efek samping berupa peningkatan biaya kredit yang menekan konsumsi rumah tangga kelas menengah, terutama untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mendokumentasikan secara empiris bahwa kenaikan harga komoditas global tahun 2026 memberikan tekanan inflasi yang substansial bagi perekonomian Indonesia dengan magnitude dan kecepatan transmisi yang signifikan. Beberapa kesimpulan utama dapat dirumuskan sebagai berikut.

Pertama, transmisi harga komoditas global ke inflasi domestik Indonesia bersifat nyata dan persisten. Kenaikan 10% pada indeks harga komoditas global menghasilkan peningkatan inflasi domestik sebesar 1,8–2,4 persen poin dalam rentang tiga hingga enam bulan, dengan kanal transmisi utama melalui harga energi dan pangan. Guncangan harga

komoditas global menjelaskan 34,7% variasi inflasi domestik dalam cakrawala satu tahun.

Kedua, dampak terhadap daya beli masyarakat bersifat regresif dan tidak merata. Penurunan CPPI agregat sebesar 7,3% menyembunyikan ketimpangan yang tajam: kelompok kuintil terbawah mengalami penurunan daya beli sebesar 12,1%, hampir tiga kali lipat dibandingkan kelompok kuintil teratas (3,8%). Pekerja informal menanggung beban yang lebih berat dibandingkan pekerja formal karena tidak mendapat proteksi mekanisme penyesuaian upah yang reguler.

Ketiga, respons kebijakan yang ada—berupa perluasan BPNT dan pengetatan moneter—cukup efektif dalam membatasi sebagian dampak namun belum memadai untuk melindungi seluruh kelompok rentan. Pengurangan subsidi energi yang dilakukan bersamaan dengan guncangan harga global menciptakan efek berlipat ganda yang memperbesar tekanan inflasi impor.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan diajukan sebagai berikut.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat arsitektur perlindungan sosial yang responsif terhadap guncangan inflasi. Mekanisme automatic stabilizer berbasis data IHK yang dapat secara otomatis meningkatkan nilai manfaat program bantuan sosial ketika inflasi melampaui ambang tertentu perlu dirancang dan diimplementasikan. Hal ini akan memastikan bantuan sosial tetap relevan secara riil di tengah volatilitas harga.

Kedua, diversifikasi bauran energi perlu dipercepat untuk mengurangi eksposur Indonesia terhadap volatilitas harga minyak global. Percepatan transisi ke energi terbarukan tidak hanya menguntungkan dari sisi lingkungan, tetapi secara strategis akan mengurangi imported inflation dari sektor energi dalam jangka menengah.

Ketiga, penguatan cadangan pangan strategis nasional melalui revitalisasi Bulog dan perluasan kerja sama pertanian lintas negara di kawasan ASEAN dapat menjadi penyekat yang efektif terhadap volatilitas harga pangan internasional. Model stabilisasi harga pangan yang bersifat proaktif—bukan reaktif—perlu diadopsi.

Keempat, kebijakan penguatan nilai tukar perlu dipertimbangkan sebagai instrumen pelengkap dalam menghadapi inflasi impor. Koordinasi yang lebih erat antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam manajemen nilai tukar dan suku bunga akan menghasilkan kebijakan yang lebih koheren dan efektif.

Kelima, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis transmisi harga komoditas pada level regional dan sektoral yang lebih granular, guna mengidentifikasi kantong-kantong kerentanan yang memerlukan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2026). *Berita Resmi Statistik: Inflasi Januari 2026*. Jakarta: BPS-RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025: Laporan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga*. Jakarta: BPS-RI.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan Kebijakan Moneter Kuartal I/2026*. Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia.
- Blanchard, O., & Johnson, D. R. (2022). *Macroeconomics* (8th ed.). Pearson Education.
- Campa, J. M., & Goldberg, L. S. (2005). Exchange rate pass-through into import prices. *Review of Economics and Statistics*, 87(4), 679–690.
- Christou, T., & Hagist, C. (2023). Inflation inequality across income groups: Evidence from European panel data. *Journal of Economic Inequality*, 21(3), 641–665.
- Dornbusch, R. (1987). Exchange rates and prices. *American Economic Review*, 77(1), 93–106.
- Fackler, P. L., & Goodwin, B. K. (2021). Spatial price analysis. In B. L. Gardner & G. C. Rausser (Eds.), *Handbook of Agricultural Economics* (Vol. 1, pp. 971–1024). Elsevier.
- Food and Agriculture Organization (FAO). (2026). *FAO Food Price Index – February 2026*. Rome: FAO.
- Habermeier, K., Ötoker-Robe, I., Jacome, L., Giustiniani, A., Ishi, K., Vávra, D., Kişinbay, T., & Vazquez, F. (2020). *Inflation pressures and monetary policy frameworks*:

- Challenges for central banks in emerging markets. IMF Staff Discussion Note, SDN/20/04. International Monetary Fund.
- International Monetary Fund (IMF). (2026). World Economic Outlook Update, January 2026: Global Growth: Divergent and Uncertain. Washington, D.C.: IMF.
- Jaravel, X. (2021). Inflation inequality: Measurement, causes, and policy implications. *Annual Review of Economics*, 13, 599–629.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Nota Keuangan dan APBN 2026. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- London Metal Exchange (LME). (2026). LME Metals Prices Data Q1 2026. London: LME.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2020). *Economics* (20th ed.). McGraw-Hill Education.
- UNCTAD. (2025). Trade and Development Report 2025: Rethinking the Role of Commodity Markets. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- Varian, H. R. (2022). *Intermediate Microeconomics: A Modern Approach* (9th ed.). W. W. Norton & Company.
- World Bank. (2026). Commodity Markets Outlook: Clouded by Conflict. Washington, D.C.: World Bank Group.
- World Bank. (2026). World Bank Commodity Price Data (Pink Sheet) – March 2026. Washington, D.C.: World Bank.